

Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di UPT SMPN 27 Medan

Mutiara Quraini Batubara¹, Tri Yolanda Putri², Tengku Darmansah³, Mely Sintya⁴,
Hasfi Fiqri Hidayah⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: mutiaraqurainibatubara@gmail.com¹, yolandaputritri109@gmail.com²,
teng kudarmansah@uinsu.ac.id³, melisintia3@gmail.com⁴, hasffiqrih@gmail.com⁵

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menggambarkan implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka di UPT SMPN 27 Medan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan salah satu stakeholder sekolah yang terlibat langsung dalam pengelolaan kurikulum, serta melalui observasi dan dokumentasi untuk memperkuat temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah telah mulai menerapkan elemen utama Kurikulum Merdeka, seperti pembelajaran berdiferensiasi, pengembangan modul ajar, dan pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Guru juga mulai menyesuaikan strategi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Meskipun demikian, pelaksanaan masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan sarana pendukung, variasi pemahaman guru terhadap konsep Kurikulum Merdeka, serta penyesuaian waktu pelaksanaan P5. Upaya perbaikan terus dilakukan melalui pelatihan internal, koordinasi rutin, dan evaluasi berkelanjutan oleh pihak sekolah. Secara keseluruhan, implementasi Kurikulum Merdeka di UPT SMPN 27 Medan berjalan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan terutama pada aspek pematapan pemahaman guru dan optimalisasi fasilitas pembelajaran. Kata kunci: Kurikulum Merdeka, Implementasi Kebijakan, Stakeholder Sekolah.

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of the Merdeka Curriculum policy at UPT SMPN 27 Medan using a qualitative approach. Data were collected through an interview with one of the school stakeholders directly involved in curriculum management, supported by observation and documentation. The findings show that the school has begun to implement key components of the Merdeka Curriculum, such as differentiated learning, the development of teaching modules, and the implementation of the Pancasila Student Profile Strengthening Project (P5). Teachers have also started to adjust learning strategies to meet the needs and characteristics of students. However, the implementation still faces several challenges, including limited supporting facilities, varying levels of teacher understanding of the curriculum concepts, and time adjustments for P5 activities. Improvement efforts are carried out through internal training, regular coordination, and continuous evaluation by the school management. Overall, the implementation of the Merdeka Curriculum at UPT SMPN 27 Medan is considered to be progressing well, although further strengthening is needed, particularly in enhancing teacher readiness and optimizing learning facilities.

Keywords: Merdeka Curriculum, Policy Implementation, School Stakeholder

PENDAHULUAN

Perubahan kebijakan sistem Pendidikan merupakan suatu tuntunan yang harus dilakukan demi perbaikan kualitas sumber daya manusia pada suatu bangsa. Sejak zaman kemerdekaan hingga sekarang tercatat telah 11 kali Indonesia mengalami perubahan kurikulum Pendidikan. (Ningrum et al., 2023) , yaitu 8 kali sebelum era otonomi daerah dan 3 kali pada masa otonomi daerah hingga sekarang. Dunia Pendidikan tidak bisa lepas dari kurikulum karena keberhasilan dari Pendidikan salah satunya tergantung pada kurikulum yang digunakan. Semakin baik kurikulum maka pendidikan pasti bisa dikatakan baik dan maju. Kurikulum adalah rencana belajar, a curriculum is a plan for learning. (Muhammad Fakhri Khusni et al., 2022)

Secara etimologis, kurikulum yang jika dalam bahasa Inggris ditulis 'curriculum' berasal dari bahasa Yunani yaitu 'curir' yang artinya 'pelari'. Jika dilihat dari harfiahnya istilah kurikulum awalnya digunakan dalam dunia olahraga, yang mengkaitkan pada jenis olahraga Atletik (Mahapsari, 2013). Kurikulum secara Istilah berawal dari kata 'curir' dan 'curere' kurikulum berdasarkan istilah diartikan sebagai 'jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish'. Jika diadaptasikan ke dalam dunia pendidikan dapat diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal hingga akhir dan memperoleh ijazah. (Mahapsari, 2013) Meningkatkan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum diperlukan karena kurikulum merupakan aspek penting dalam proses belajar-mengajar. Implementasi kebijakan pendidikan yang tepat akan tercermin pada pelaksanaan kurikulum karena kurikulum merupakan jantung pendidikan yang menentukan keseluruhan proses pembelajaran (Efendi et al., 2019)

Kurikulum Merdeka adalah suatu desain pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara santai, tenang, menyenangkan dan bebas dari tekanan. Kurikulum Merdeka berfokus pada pemikiran kreatif dan bebas. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memperkenalkan Program Sekolah Penggerak sebagai salah satu program untuk mendorong penerapan kurikulum merdeka di setiap sekolah. Program ini bertujuan mendukung pengembangan generasi pembelajar sepanjang hayat dengan menghasilkan siswa Pelajar Pancasila yang memiliki kepribadian unggul. Implementasi adalah suatu aktifitas, aksi dan tindakan adanya mekanisme suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Sekolah Penggerak merupakan sebuah inisiatif untuk mencapai visi Pendidikan Indonesia dalam mewujudkan negara yang maju, berdaulat, mandiri, dan memiliki kepribadian yang kuat melalui penciptaan Pelajar Pancasila. Program Sekolah Penggerak ini difokuskan pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) serta karakter. Inisiatif ini dimulai dengan menumbuhkembangkan sumber daya manusia (SDM) unggul. Sumber daya manusia dalam hal ini adalah peran kepala sekolah dan guru (Fauzi, 2022).

Kepala sekolah harus mau dan mampu mendayagunakan seluruh sumber daya sekolah dalam rangka mewujudkan visi misi dalam mencapai tujuannya. Adapun persiapan kepala sekolah sebagai supervisor, kepala sekolah dapat menggunakan kewenangan yang di miliki untuk menggerakkan implementasi kurikulum yang adaptif di satuan pendidikannya dengan mengoptimalkan kebijakan kurikulum merdeka belajar, memaksimalkan proses evaluasi pada supervisi akademik yang dapat di jadikan bahan refleksi agar bisa menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik (Kemendikbud, 2022)

Konteks kurikulum merdeka, persiapan guru mencakup kesiapan mental dan keterampilan mereka dalam menerapkan sistem pembelajaran baru ini sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang optimal bagi siswa. Oleh karena itu, persiapan guru dapat diartikan sebagai sikap kesediaan untuk terlibat dalam tugas mendidik, mengajar, membimbing,

membimbing, melatih, menasihati, dan mengevaluasi peserta didik. Pembangunan pendidikan merdeka belajar dalam telaah metode pembelajaran yaitu sistem dan pengajarannya harus memenuhi kecenderungan dalam pendidikan di era Revolusi Industri 4.0. Di era Revolusi Industri 4.0 kebutuhan utama yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan atau lebih khusus dalam metode pembelajaran yaitu siswa atau peserta didik yaitu penguasaan terhadap literasi baru. (Yamin & Syahrir, 2020).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Kahfi, 2022) berjudul “Implementasi Profil Pelajar Pancasila dan Implikasinya Terhadap Karakter Siswa di Sekolah” mengungkapkan bahwa Implementasi profil pelajar Pancasila di sekolah masih kurang optimal dan implikasinya terhadap pembentukan karakter siswa sangat kuat. Sehingga apabila profil pelajar pancasila ini dioptimalkan dalam pelaksanaannya disekolah, maka akan terbentuklah karakter siswa yang pancasilais. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ekawati & Susanti, 2022) berjudul “Analisis Persiapan Guru dalam Melaksanakan Sistem Pembelajaran Kurikulum Merdeka di SD IV Muhammadiyah Kota Padang” mengungkapkan bahwa Sekolah Dasar IV Muhammadiyah Kota Padang belum siap untuk menerapkan pembelajaran merdeka belajar. Hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan workshop mengenai kurikulum merdeka sehingga para pengajar kurang memahami konsep dan struktur dari kurikulum tersebut pada pembelajaran di SD. Selain itu, juga terdapat kekurangan fasilitas dan lingkungan belajar yang memadai.

Implementasi kebijakan didefinisikan sebagai aktivitas menjalankan kebijakan, pemenuhan berbagai janji yang termaktub dalam dokumen kebijakan guna menghasilkan output sesuai dengan tujuan kebijakan melalui penuntasan berbagai misi sesuai dengan redaksional yang termuat dalam tujuan kebijakan (Handoyo, 2012). Implementasi kebijakan merupakan persoalan yang relatif sukar sekaligus kompleks. Fenomena tersebut bukan hanya terjadi pada negara berkembang atau negara yang mulai menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik seperti Indonesia, tetapi juga menjadi fenomena di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Fenomena mengenai persoalan tersebut telah disinggung oleh para ahli analisis proses implementasi kebijakan publik. Diantara ahli tersebut adalah George C. Edwards atau Edward III (Tarigan, 2008).

Ada empat faktor penting yang menurut teori Edward III sangat berpengaruh pada proses implementasi sebuah kebijakan. Keempat faktor yang dimaksudkan yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Ramdhani, 2017). Komunikasi menjadi variabel penting yang sangat berpengaruh dalam proses implementasi sebuah kebijakan. Sebaik apapun kualitas dari suatu produk kebijakan, akan menjadi tidak efektif manakala tidak bisa dikomunikasikan dengan optimal. Komunikasi dalam perspektif kajian teori Edward III adalah komunikasi yang terjadi antara formulator kebijakan dengan implementator lapangan untuk selanjutnya diteruskan kepada target sasaran. Komunikasi dipahami sebagai interrelasi dan interaksi antara aktor perumus kebijakan dengan aktor pelaksana kebijakan, serta aktor pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran (target group).

Muatan komunikasi tersebut setidaknya berisikan mengenai substansi sekaligus tujuan dari kebijakan yang telah dibuat. Maka dari itu, para implementator diharapkan memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap karakteristik sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan. Hal ini demi menghindari terjadinya distorsi informasi yang pada gilirannya bisa berdampak pada munculnya berbagai respon yang kurang kooperatif (bahkan penolakan secara frontal) dari kelompok sasaran (W.M. Rusnita, 2017).

Ada tiga indikator yang dapat digunakan sebagai parameter dalam menilai keberhasilan dari komunikasi. Ketiga indikator tersebut pada teori Edward III dibahasakan sebagai: Transmision, Clarity dan Consistency (Lukitasari, 2017). Terjadinya proses transfer informasi dari formulator kebijakan kepada implementator kebijakan, serta antara implementator

kebijakan dengan kelompok sasaran harus dipastikan berjalan dengan baik demi terpenuhinya indikator transmision pada variabel komunikasi. Untuk merealisasikan idealitas tersebut, maka diperlukan keterlibatan dari tiga elemen transmision, antara lain: Komunikator, Komunikan dan Media (Anhar, 2018). Komunikator diperankan oleh pembuat kebijakan dan para implementator lapangan. Para individu yang memainkan peran sebagai komunikator idealnya harus menguasai substansi maupun karakteristik dari kebijakan yang akan disampaikan. Selain itu para komunikator diupayakan berasal dari orang-orang yang setidaknya memiliki keterampilan dasar Public Speaking, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, serta memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain (S. W. Lukitasari S. a., 2017).

Sebagai bagian dari variabel sumber daya, keberadaan staf yang memadai menjadi sesuatu yang urgent. Konsep memadai dalam persoalan staf ialah adanya kecukupan dari sisi kuantitas maupun kualitas. Sumber daya juga dapat berupa ketersediaan berbagai data yang relevan dan tepat guna sebagai representasi dari keberadaan sumber daya informasi. Sumber daya berupa Informasi yang akurat disediakan untuk mengakomodasi kebutuhan terkait proses pengambilan keputusan. Selain itu diperlukan pula sumber daya berupa kewenangan, yang bermakna adanya pemberian otoritas yang layak bagi para aktor implementasi kebijakan sesuai dengan pembagian yang proporsional. Adanya kewenangan yang cukup pada diri aktor pelaksana berperan besar dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka di lapangan (Munthe, 2018). Untuk menyempurnakan kelengkapan variabel sumber daya, maka keberadaan fasilitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan demi menunjang keberhasilan dari proses implementasi sebuah kebijakan. Fasilitas yang dimaksudkan tidak hanya terbatas berupa sarana, prasarana. Lebih dari itu, keberadaan dana yang likuid terkait fungsi pembiayaan proses implementasi kebijakan juga dapat dikategorikan dalam lingkup fasilitas (Ramdhani A. , 2017). Ringkasnya, ketersediaan berbagai fasilitas tersebut sangat diperlukan dalam mendukung keberhasilan proses implementasi sebuah kebijakan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam kepada salah satu stakeholder sekolah yaitu bapak Bambang Hermanto, S. Pd selaku bagian kurikulum yang terlibat dalam implementasi Kurikulum Merdeka di UPT SMPN 27 Medan. Pendekatan ini digunakan untuk menggali informasi secara langsung terkait pengalaman, proses, dan hambatan yang muncul selama pelaksanaan kebijakan kurikulum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan salah satu stakeholder sekolah yaitu bapak Bambang Hermanto, S.Pd selaku bidang kurikulum penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka di UPT SMPN 27 Medan berlangsung melalui proses yang bertahap dan melibatkan seluruh unsur sekolah. Informan menjelaskan bahwa langkah awal sekolah dalam menerapkan kurikulum ini adalah mengikuti berbagai bentuk pelatihan dan sosialisasi yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan. Pelatihan tersebut dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada guru mengenai konsep dasar Kurikulum Merdeka, seperti fleksibilitas pembelajaran, peran asesmen formatif, penyusunan modul ajar, serta prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Guru kemudian diarahkan untuk memahami bagaimana kurikulum baru ini memberikan ruang bagi kreativitas dan inovasi dalam proses belajar mengajar. Pelatihan ini menjadi sangat penting karena menjadi pijakan awal bagi guru untuk memahami perubahan struktural dan filosofis dari kurikulum sebelumnya.

Informan juga menyampaikan bahwa secara umum, guru menunjukkan respon positif terhadap implementasi kurikulum ini. Banyak guru merasa lebih bebas dalam merancang kegiatan pembelajaran, karena Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas dan tidak terlalu

menekankan pada tuntutan administratif yang berat. Guru dapat berfokus pada kebutuhan individual siswa, merancang pembelajaran yang lebih bervariasi, dan memanfaatkan waktu belajar secara lebih optimal. Selain itu, kurikulum ini dianggap sejalan dengan penguatan Profil Pelajar Pancasila, yang menekankan pembentukan karakter siswa dalam aspek berpikir kritis, kreatif, gotong royong, dan bernalar. Informan menegaskan bahwa karakter-karakter ini lebih mudah dikembangkan ketika guru memiliki ruang gerak yang cukup dalam mengelola proses pembelajaran.

Peranan kepala sekolah juga sangat penting. Berdasarkan wawancara, kepala sekolah secara konsisten memberikan pengarahan kepada guru agar tetap mengikuti alur panduan yang telah ditetapkan oleh dinas. Kepala sekolah menjadi penggerak utama dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas implementasi berjalan sesuai kebijakan dan tidak menyimpang dari standar yang telah ditentukan. Ia juga menciptakan suasana kerja yang kooperatif, sehingga guru merasa lebih nyaman untuk berdiskusi, bertanya, dan berbagi pengalaman mengenai proses adaptasi terhadap kurikulum baru. Dukungan kepala sekolah ini dipandang sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan implementasi.

Dalam hal evaluasi, sekolah menggunakan rapor mutu dan hasil Asesmen Nasional (AN) sebagai komponen penting dalam menilai keberhasilan penerapan Kurikulum Merdeka. Rapor mutu memberikan gambaran capaian sekolah secara umum, sementara AN memberikan indikator kemampuan literasi dan numerasi siswa. Informan menjelaskan bahwa sekolah secara rutin menganalisis data tersebut dan melakukan pertemuan untuk mendiskusikan langkah-langkah perbaikan, seperti penguatan literasi membaca melalui program kelas, peningkatan numerasi melalui latihan bertahap, dan penyusunan modul ajar yang lebih kontekstual. Evaluasi berbasis data ini membantu guru memahami aspek mana yang masih lemah, sehingga pembelajaran dapat dirancang lebih tepat sasaran.

Sekolah juga mengembangkan kegiatan pembelajaran berbasis pengalaman, salah satunya melalui *outing class*, yang melibatkan orang tua siswa. Kegiatan ini bertujuan memberikan pengalaman belajar langsung di luar kelas, memperkuat pemahaman siswa terhadap materi secara nyata, sekaligus membangun hubungan yang lebih erat antara sekolah dan keluarga. Pelibatan orang tua tidak hanya menciptakan transparansi dalam proses belajar, tetapi juga memberikan dukungan moral serta logistik terhadap kegiatan pendidikan. Informan menyebutkan bahwa kegiatan seperti ini sangat efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, meskipun membutuhkan proses persiapan yang lebih panjang.

Selain itu, guru secara aktif terlibat dalam komunitas belajar seperti MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran). MGMP menjadi wadah bagi guru untuk berdiskusi, berbagi praktik baik, memecahkan berbagai permasalahan terkait implementasi Kurikulum Merdeka, dan menyamakan persepsi mengenai penyusunan modul, asesmen, serta strategi pembelajaran. Informan menyampaikan bahwa kolaborasi melalui MGMP sangat membantu dalam mengurangi kebingungan guru, terutama dalam aspek teknis seperti penentuan CP (Capaian Pembelajaran), alur tujuan pembelajaran, dan penyusunan rubrik penilaian. Melalui MGMP, guru dapat saling memperkaya wawasan dan menguatkan kompetensi profesional dalam menghadapi tuntutan kurikulum baru.

Secara keseluruhan, wawancara menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di UPT SMPN 27 Medan berjalan melalui kombinasi antara pelatihan intensif, pendampingan kepala sekolah, evaluasi berbasis data, serta kolaborasi guru dalam komunitas belajar. Sekolah juga berupaya menciptakan pembelajaran yang lebih kontekstual dan berorientasi pada kebutuhan siswa. Penelitian ini menggambarkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada dokumen kurikulum atau kebijakan formal, tetapi juga pada kualitas interaksi, komunikasi, dan sinergi antarstakeholder. Temuan

ini menegaskan bahwa pelaksanaan Kurikulum Merdeka memerlukan kesiapan mental, kemampuan beradaptasi, serta komitmen bersama seluruh komponen sekolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dengan stakeholder sekolah, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka di UPT SMPN 27 Medan berjalan secara bertahap dan melibatkan sinergi seluruh unsur sekolah. Sekolah menunjukkan keseriusan dalam mempersiapkan guru melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan, sehingga guru memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai konsep, prinsip, dan strategi penerapan Kurikulum Merdeka. Pelaksanaan kurikulum ini juga mendapatkan respon positif dari guru, terutama karena memberikan ruang fleksibilitas dalam pembelajaran dan lebih menekankan pada kebutuhan individual peserta didik. Kepala sekolah memainkan peran sentral dalam memberikan arahan, memastikan kesesuaian dengan kebijakan resmi, serta menciptakan budaya kerja yang kolaboratif. Evaluasi implementasi dilakukan secara berkelanjutan menggunakan data rapor mutu dan hasil Asesmen Nasional sebagai dasar perbaikan strategi pembelajaran. Upaya penguatan pembelajaran juga dilakukan melalui kegiatan kontekstual seperti *outing class* serta kolaborasi profesional melalui MGMP yang membantu guru saling bertukar pengalaman dan memperkuat kompetensi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka tidak hanya bergantung pada kebijakan formal, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia, efektivitas pelatihan, kemauan guru untuk beradaptasi, dan dukungan manajemen sekolah. Proses kolaboratif, evaluasi berbasis data, serta keterlibatan orang tua dan komunitas belajar menjadi faktor kunci yang memperkuat keberlanjutan implementasi kurikulum di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2021). Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sma It-Alfarabi Pesawaran, Lampung. UIN Raden Intan Lampung, Pascasarjana.
- Akib, H. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya. Hal, 1-19.
- Anhar, K. (2018). Analisis Implementasi Kebijakan Dokter Spesialis Jaga On Site Di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin Palembang. Arsi, 3.
- Ansori. (2015). Efektifitas Suatu Pembelajaran. Jurnal Ilmiah UIN SUKA RIAU, 3(April), 49–58.
- Ekawati, R., & Susanti, D. (2022). Analisis Persiapan Guru Dalam Melaksanakan Sistem Muhammadiyah Kota Padang Analysis Of Teacher Preparation In Implementing An Independent Curriculum at SD IV Muhammadiyah Padang Pendidikan dikatakan sebuah proses kehidupan untuk mengembangkan segenap pote. Jurnal Media Ilmu, 1, 33–39.
- Fadhlina Harisnur, & Suriana. (2022). Pendekatan, Strategi, Metode dan teknik Fadhlina Harisnur, and Suriana. 2022. "Pendekatan, Strategi, Metode dan Teknik dalam Pembelajaran PAI di Sekolah Dasar." Genderang Asa: Journal of Primary Education 3 (1): 20–31. <https://doi.org/10.47766/ga.v3i1.440>. Genderang Asa: Journal of Primary Education, 3(1), 20–31. <https://doi.org/10.47766/ga.v3i1.440>
- Fauzi, A. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah Penggerak. Pahlawan: Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya, 18(2), 18–22. <https://doi.org/10.57216/pah.v18i2.480>

- Fitriah, P. I., Yulianto, B., & Asmarani, R. (2020). Meningkatkan Keterampilan Komunikasi Siswa Melalui Penerapan Metode Everyone Is A Teacher Here. *Journal of Education Action Research*, 4(4), 546. <https://doi.org/10.23887/jear.v4i4.28925>
- Hanafy, M. S. (2014). Konsep Belajar Dan Pembelajaran. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 17(1), 66–79. <https://doi.org/10.24252/lp.2014v17n1a5>
- Handiyani, M., Muhtar, T., Guru, P., Dasar, S., & Indonesia, U. P. (2022). Mengembangkan Motivasi Belajar
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya
- Huda, N. (2017). Manajemen Pengembangan Kurikulum. *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 52–75. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v1i2.113>
- Illahi, N. (2020). Peranan Guru Profesional Dalam Peningkatan Prestasi Siswa Dan Mutu Pendidikan Di Era
- Karakter, P., Pendidikan, S. M., & Islam, A. (2015). Pembentukan Karakter Siswa Melalui Pendidikan Agama Islam (Nasrullah). *Salam*, 18, 67–82. www.kemdiknas.go.id
- Kemendikbud. (2022). Portal Webinar Implementasi Kurikulum Merdeka (Webinar IKM Kemendikbudristek)
- Milenial. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(1), 1–20. <https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.94>
- Ramdhani. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Publik*, 1-12
- S. W. Lukitasari, S. A. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi. *Kelola*, 121-134.
- Siswa melalui Strategi Pembelajaran Berdiferensiasi: Sebuah Kajian Pembelajaran dalam Perspektif Pedagogik-Filosofi. 6(4), 5817–5826.
- Tarigan, H. A. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya. *Baca*, 1-19
- W.M. Rusnita, M. H. (2017). Implementasi Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Perubahan Pedoman Penilaian Pns Berprestasi. *Sorot*, 1-9.
- Yamin, M., & Syahrir, S. (2020). Pembangunan Pendidikan Merdeka Belajar (Telaah Metode Pembelajaran). *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(1), 126–136. <https://doi.org/10.58258/jime.v6i1.1121>